

ABSTRAK

IMPLIKASI DIGITALISASI SERTIPIKAT TANAH TERHADAP PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Oleh
AHMAD NADLIF FADILA

Sertipikat tanah elektronik merupakan bentuk modernisasi administrasi pertanahan yang diterbitkan melalui sistem elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional. Penerapan sertipikat tanah elektronik membawa implikasi yuridis terhadap sistem pembuktian dalam sengketa pertanahan di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perubahan ini menimbulkan pergeseran paradigma pembuktian dari penilaian dokumen fisik menuju penilaian keandalan sistem elektronik, autentikasi, serta integritas data yang menjadi dasar penerbitannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum terkait kedudukan sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti serta syarat pembuktiannya pada praktik peradilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sertipikat tanah elektronik sebagai alat pembuktian yang kuat, serta mengetahui syarat sertipikat tanah elektronik dalam sengketa tanah di pengadilan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, memanfaatkan peraturan perundang-undangan, dan didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat tanah elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Di Pengadilan Negeri, sertipikat ini diposisikan sebagai bukti surat (akta) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara, namun kekuatannya tidak mutlak. Di PTUN, sertipikat tersebut memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara . Sementara itu, syarat sertipikat tanah elektronik agar dapat digunakan dalam Pembuktian sengketa tanah di pengadilan adalah harus memenuhi keabsahan aspek formil dan materiil, yang meliputi terjaminnya autentikasi, integritas data elektronik, serta keandalan sistem elektronik sesuai dengan standar Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023.

Kata Kunci: Implikasi, Digitalisasi, Sertipikat Tanah Elektronik

ABSTRACT

THE IMPLICATIONS OF LAND CERTIFICATE DIGITALIZATION ON EVIDENTIARY PROCEDURES

By

ACHMAD NADLIF FADILLA

Electronic land certificates represent a modernization of land administration issued through an electronic system by the National Land Agency (BPN). The implementation of electronic land certificates carries juridical implications for the evidentiary system in land disputes within the judiciary, both in District Courts and State Administrative Courts. This transition triggers a shift in the evidentiary paradigm from the assessment of physical documents toward the evaluation of electronic system reliability, authentication, and the integrity of the data underlying its issuance. This research is motivated by the need for legal certainty regarding the legal standing of electronic land certificates as evidence and the requirements for their admissibility in judicial practice, as regulated under the Regulation of the Minister of Agraria and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates.

This research aims to determine the legal standing of electronic land certificates as a strong instrument of proof and to identify the requirements for electronic land certificates to be utilized in land disputes in court. This study employs a normative legal approach, utilizing statutory regulations and supported by empirical data obtained through interviews with judges.

The results indicate that electronic land certificates hold valid legal standing as evidence based on Article 5 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. In District Courts, these certificates are positioned as documentary evidence (deed) as referred to in Article 1866 of the Civil Code, although their evidentiary value is not absolute. In State Administrative Courts, these certificates meet the qualifications of a State Administrative Decision (KTUN) pursuant to Article 1 point 9 of Law No. 51 of 2009. Furthermore, the requirements for electronic land certificates to be admissible in land dispute proceedings include fulfilling formal and material validity, which encompasses guaranteed authentication, electronic data integrity, and system reliability in accordance with the standards set by Minister of ATR/BPN Regulation No. 1 of 2021 and Minister of ATR/BPN Regulation No. 3 of 2023.

.Keywords: Implication, Digitalization, Electronic Land Certificates